

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 Tahun 2019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5494 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pmerintah tentang Pelaksana Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552 Tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi*, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581 Tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi*, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

146 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581 Tahun 2005.

## B. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
- Atmasasmita, Romli dkk. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.
- Basah, Sjahran. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Danil, Elwi. "*Korupsi*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Djaja, Ermansjah. "*Memberantas Korupsi Bersama KPK*". Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2020.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1995
- Effendi, A'an, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 1994.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing. 2016.
- Kusuma, RM. A. B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: FH UI. 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali PascaAmandemen Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Musandj, Rosdakarya. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung. 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt.Citra Aditya. 2014.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka. 2014.
- Soekanto, Soerjoeno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres. 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Surachmad, Wirjo. *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1993.
- Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali. 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung. 1995.

Wursanto, I.G. *Managemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kenisius. 1989.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

### C. Lain-Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working grup (ACWG) Tahun 2012-2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019.

Mahardika and Firman Wijaya. "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Hukum Adigama*.

Nurtjahjo, Hendra. *Lembaga Badan Komisi Negara Independen di Indonesia: Tujuan Hukum Tata Negara*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2005.

Rizaldi, Mohd. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen?". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 12, No. 01 Tahun 2021. di: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/3754/2431>.

Saragih, Yasmira Mandasari. "Analisis Yuridis kewenangan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, tersedia di, <http://journal.uniku.ac.id/indx.php/unifikasi>, diakses tanggal 20 Maret 2022 diterbitkan oleh UNIFIKSI. Vol. 5 No.1 Tahun 2018.

Susanto, Mei. *Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, tersedia di <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. vol. 18, No. 1. 2018.

User, Super "Jalan Panjang Menuju KPK". tersedia di <http://www.acch.kpk.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Wijayanto, "Tentang KPK/Sekilas KPK", tersedia di <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>. Di akses Pada tanggal 25 Maret 2022.